

Peranan Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten Lamongan

Karyohadi, Muhammad Mudjib Musta'in, Humaidah Muafiqie
Universitas Darul Ulum, Jombang
karyohadi@gmail.com, gus.mmr@gmail.com, fiqie63@gmail.com

ABSTRAKSI

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh jenjang pendidikan yang meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan perguruan tinggi terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja yang relatif lebih tinggi daripada kesempatan kerja antara lain Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga melebihi pertumbuhan capital, demografi profil penduduk muda sehingga banyak yang masuk ke lapangan kerja dan struktur industri yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi yang rendah dalam membuat usaha penciptaan lapangan kerja.

Pertumbuhan angkatan kerja hingga sampai saat ini terbilang masih relatif tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tersedia terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah pengangguran. Tingginya pengangguran tenaga kerja terdidik terutama bagi lulusan pendidikan tinggi. Lulusan pendidikan tinggi ini tidak langsung terserap oleh lapangan kerja, sehingga pengangguran tenaga kerja terdidik semakin lama semakin meningkat pada tiap tahunnya. Kecenderungan meningkatkan angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadi suatu masalah yang serius.

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan bahwa jenjang pendidikan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Dari ketiga variabel tersebut jenjang pendidikan, maka lulusan SLTA atau sekolah kejuruan mempunyai pengaruh paling besar terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan. Pendidikan menengah, khususnya sekolah kejuruan memberikan kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor industri kecil. Pendidikan menengah kejuruan diselenggarakan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha, ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program kejuruan yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya. Pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya. Dengan demikian, maka pemerintah perlu memperhatikan masalah pentingnya pendidikan, karena dengan semakin baik sistem pendidikan yang ada, akan mampu mencetak generasi penerus bangsa yang kreatif, sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan baru.

Kata kunci : *tingkat pendidikan, penyerapan tenaga kerja.*

ABSTRACT

The objectives of this research is to analyze how much influence education covering primary, secondary and college education on the level of employment in the enterprises in Lamongan.

There are factors that affect the growth of the labor force is relatively higher than other job opportunities between high population growth that exceeds the growth of capital, demographic profile of young people so much that goes into employment an industrial structure tends to have a higher diversification of economic activity is low as well as the skill level of the population is not adequate to make job creation efforts.

Growth of the labor force is fairly up to date is still relatively high, while job vacancies available or limited. This resulted in the problem of unemployment. The high unemployment of educated labor, especially for higher education graduates. Graduates of higher education is not readily absorbed by the employment, so unemployment of educated labor progressively increased in each year. The rising trend of unemployment of educated labor has become a serious problem.

From the research and discussion that has been that the level of education has a significant contribution to employment in Lamongan. Of the three variables level of education, the high school of vocational school graduates have the most impact on employment in Tuban. Secondary education, particularly vocational schools provide a major contribution in employment, particularly in the small industry sector. Secondary vocational education was organized used in the development of science, technology, and / or art, industry business, employment both nationally, regionally and globally, except for vocational programs related to the efforts of preservation of cultural heritage. Vocational education is part of the education system the prepares a person to be able to work in a job group or an occupation than other occupations fields. Thus, the government needs to pay attention to important issues of education, the better because the existing education system, will be able to print the nation's next generation of creative, so as to create new job opportunities.

Keywords: education, employment.

PENDAHULUAN

Pembangunan dilakukan dalam berbagai sektor kehidupan dan melibatkan kegiatan produksi. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka panjang (Sadono Sukirno, 2003).

Peranan sumber daya manusia yang meliputi jumlah dan kualitas sangat mutlak dibutuhkan dalam pembangunan. Dalam hubungannya dengan kualitas sumber daya manusia, pendidikan dianggap sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Pendidikan yang baik diharapkan mampu memberikan sumber daya manusia yang baik pula. Namun dalam kenyataannya sekarang ini, pendidikan juga dianggap berkaitan erat dengan pengangguran, khususnya pengangguran tenaga kerja terdidik. Kecenderungan makin meningkatnya tingkat pendidikan akan berakibat meningkatnya pula angka pengangguran tenaga kerja terdidik daripada bertambahnya tenaga kerja yang mempunyai produktivitas sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja (Sutono, dkk, 1999).

Menurut Moelyono dalam Sutomo (1999), menyatakan bahwa meningkatnya pengangguran tenaga kerja terdidik disebabkan oleh makin tingginya tingkat pendidikan maka makin tinggi pula aspirasinya untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai dengan keinginan, sehingga proses untuk mencari kerja lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan tenaga kerja terdidik lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak disukai.

Pengangguran tenaga kerja terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan setingkat SMA ke atas terhadap angkatan kerja (BPS, 2008). Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah salah satu masalah makroekonomi. Faktor-faktor penyebab tenaga kerja terdidik dapat dikatakan hampir sama di setiap negara, krisis ekonomi, struktur lapangan kerja tidak seimbang, kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik tidak seimbang, dan jumlah angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan kesempatan kerja (Ika Sriyanti, 2009).

Menurut Josy P. Moeis dalam Sutomo, dkk (1999), bahwa tenaga kerja dengan pendidikan kejuruan mempunyai ketrampilan khusus yang dipersiapkan memasuki dunia kerja sehingga dapat dikatakan probabilitas untuk menganggur lebih kecil daripada tenaga kerja berpendidikan umum. Pencari kerja dengan latar belakang sekolah kejuruan akan lebih mudah memperoleh pekerjaan sehingga lamanya menganggur juga pendek karena jenis pencari kerja ini memiliki biaya training yang rendah.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja yang relatif lebih tinggi daripada kesempatan kerja (Sadono Sukirno, 2003):

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga melebihi capital
- 2) Demografi profil penduduk muda sehingga banyak yang masuk ke lapangan kerja.
- 3) Struktur industri cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi yang rendah serta tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai dalam membuat usaha penciptaan lapangan kerja. Pertumbuhan angkatan hingga sampai saat ini terbilang masih relatif tinggi, sedangkan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tersedia terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah pengangguran.

Tingginya pengangguran tenaga kerja terdidik terutama bagi lulusan pendidikan tinggi. Lulusan pendidikan tinggi ini tidak langsung terserap oleh lapangan kerja, sehingga pengangguran tenaga kerja terdidik semakin lama semakin meningkat pada tiap tahunnya. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadi suatu masalah yang serius. Kemungkinan ini disesuaikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja terdidik lebih mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja dan lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak disukai (Mauley Moelyono dalam Sutomo, dkk 1999).

Di Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa pekerja yang berpendidikan rendah lebih besar daripada pekerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih cepat terserap oleh lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih mau mengerjakan apa saja, sehingga pada kelompok ini lebih cepat memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja dengan tingkat pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan lebih rendah, yakni tamatan SD dan SMP. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar proporsi penganggur terdidik, dan semakin besar proporsi penganggur terdidik semakin lama mengalami masa tunggu.

Salah satu penyebab tingginya angka pengangguran di Kabupaten Lamongan adalah tidak terpenuhinya kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dapat diserap oleh industri/perusahaan yang ada di Kabupaten Lamongan, karena sebagian besar pengangguran adalah lulusan SMA yang sama sekali tidak mendapatkan (tidak mempunyai) bekal ketrampilan pada saat sekolah.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor penyebabnya adalah *ketidak tepatan* sarana pendidikan yang tersedia dan minimnya sarana pendidikan yang ada. Oleh karenanya perlu dikembangkan sarana (jenis) pendidikan yang dapat memberikan bekal keahlian dan ketrampilan yang pada akhirnya dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terkait dengan kondisi tersebut, maka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) memberikan alternatif solusi dengan memberikan bekal kompetensi yang terpakai di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bekal inilah, siswa diharapkan mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik sebab mempunyai kemampuan untuk berkeja. Tetapi, yang penting adalah bahwa bersekolah bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan, karena bersekolah secara khusus memang tidak dialokasikan sebagai alat untuk mencari pekerjaan, melainkan sebagai bekal

untuk bekerja dengan cara menciptakan pekerjaan untuk dirinya dan orang-orang yang ada disekitarnya.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja yang relatif lebih tinggi daripada kesempatan kerja antara lain Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga melebihi pertumbuhan capital, demografi profil penduduk muda sehingga banyak yang masuk ke lapangan kerja dan struktur industri yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi yang rendah serta tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai dalam membuat usaha penciptaan lapangan kerja. (Sadono Sukirno, 2003).

Pertumbuhan angkatan kerja hingga sampai saat ini terbilang masih relatif tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tersedia terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah pengangguran. Tingginya pengangguran tenaga kerja terdidik terutama bagi lulusan pendidikan tinggi. Lulusan pendidikan ini tidak langsung terserap oleh lapangan kerja, sehingga pengangguran tenaga kerja terdidik semakin lama semakin meningkat pada tiap tahunnya. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadi suatu masalah yang serius.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja yang relatif lebih tinggi daripada kesempatan kerja antara lain Pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga melebihi pertumbuhan capital, demografi profil penduduk muda sehingga banyak yang masuk ke lapangan kerja dan struktur industri yang cenderung mempunyai tingkat diversifikasi kegiatan ekonomi yang rendah serta tingkat ketrampilan penduduk yang belum memadai dalam membuat usaha penciptaan lapangan kerja. (Sadono Sukirno, 2003).

Pertumbuhan angkatan kerja hingga sampai saat ini terbilang masih relatif tinggi, sedangkan lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan yang tersedia terbatas. Hal ini mengakibatkan masalah pengangguran. Tingginya pengangguran tenaga kerja terdidik terutama bagi lulusan pendidikan tinggi. Lulusan pendidikan ini tidak langsung terserap oleh lapangan kerja, sehingga pengangguran tenaga kerja terdidik semakin lama semakin meningkat pada tiap tahunnya. Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadi suatu masalah yang serius.

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa besar peranan tingkat pendidikan yang meliputi pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK) dan Perguruan Tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kasus yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Berdasarkan maksud dan tujuan penulis dalam memperoleh data dengan penelitian studi kasus yaitu menganalisa secara akurat, sistematis mengenai fakta-fakta yang ada dengan sifat populasi tertentu, bertujuan menjelaskan variabel tentang suatu keadaan (Sugiono, 2004).

Populasi dalam penelitian ini adalah para pencari kerja di Kabupaten Lamongan yang telah terdaftar di Departemen Tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.. sampel yang diambil adalah sebanyak 6 tahun, yaitu dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dengan menggunakan time series. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, berupa data para pencari kerja untuk lulusan SD/SLTP, lulusan SLTA dan lulusan data para perguruan tinggi serta besarnya penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Observasi (pengamatan), Interview atau wawancara, Studi Kepustakaan dan Metode Dokumentasi. Analisis Data dengan mengelompokkan data terkumpul, terlebih dahulu diadakan editing dan selanjutnya pengelompokkan data, lalu dilakukan tabulasi secara manual dan hasilnya dimasukkan dalam tabel. Data yang telah tersusun dalam bentuk tabel tersebut diolah dan dianalisa secara deskriptif dan statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Lamongan

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu:

1. Bagian Tengah Selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu.
2. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengankesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
3. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.

Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak 6 51' 51" – 7 23' 06" Lintang Selatan dan 112 33' 45" – 112 33' 45" bujur Timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.181,2 km² atau 13,78% dari luas wilayah Propinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km² apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut.

Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah: Sebelah Utara perbatasan dengan laut Jawa, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk menyusun Undang-undang yang mengatur Pengelolaan Keuangan Negara Indonesia dan elemen pokok dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan adalah "Terwujudnya Masyarakat Lamongan Yang Sejahtera, Berkeadilan, Beretika dan Berdaya Saing". Sedangkan misinya adalah : meningkatkan kualitas hidup dan daya saing masyarakat; serta menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dasar (infrastruktur dan utilitas), yaitu dengan upaya :

1. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, produktifitas sektor-sektor andalan, dan pendayagunaan sumber daya alam.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) menuju pemerintahan bersih (Clean Government)
3. Memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang tentram tertib dan aman dengan menjunjung tinggi kearifan nilai-nilai budaya lokal & kesetaraan gender.

Menurut data Survey Sensus Ekonomi Nasional (susenas) Propinsi Jawa Timur Tahun 2011 jumlah penduduk Kabupaten Lamongan tahun 2011 sebanyak 1.261.972 jiwa, terdiri dari 646.930 jiwa (51,26%) perempuan dan 615.142 jiwa (48,74%) laki-laki. Dengan komposisi kelompok umur berdasarkan jenis kelamin laki-laki usia 0-14 tahun sebanyak 170.087 jiwa (27,65%), usia 15-64 tahun sebanyak 407.040 (66,17%) dan usia di atas 65 tahun sebanyak 38.015 jiwa (6,18%). Sedangkan kelompok umur perempuan usia 0-14 tahun sebanyak 151.617 jiwa (23,44%), usia 15-64 tahun sebanyak 436.092 (67,42%) dan usia di atas 65 tahun sebanyak 59.121 jiwa (9,14%), sehingga jumlah penduduk Kabupaten Lamongan secara keseluruhan berdasarkan kelompok usia 0-14 tahun sebanyak 321.704 jiwa, usia 15-64 tahun sebanyak 843.132 jiwa, usia 65 ke atas sebanyak 97.136 jiwa.

Komposisi penduduk Kabupaten Lamongan menurut kelompok umur, menunjukkan bahwa penduduk yang berusia muda (0-14 tahun) sebesar 18,50%, yang berusia produktif (15-64 tahun) sebesar 77,05% dan yang berusia tua (>65 tahun) sebesar 4,45%. Dengan demikian maka Angka Beban Tanggungan (*Dependency ratio*) penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 2008 sebesar 37,1%.

Laju inflasi PDRB Kabupaten Lamongan tahun 2011 yaitu 3,48% dan naik di tahun 2012 menjadi 6,31%. Hal ini disebabkan oleh kondisi perekonomian baik nasional, regional maupun domestik yang relatif kurang stabil. Selain itu juga didukung dengan ketersediaan bahan pokok di Kabupaten Lamongan distribusinya kurang merata. Hal ini kurang menguntungkan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Lamongan yang ditandai dengan nilai investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang kenaikannya kurang signifikan.

Sebagai langkah strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan ekonomi daerah, maka ada komponen utama yang perlu diketahui yaitu potensi unggulan daerah. Dengan mengetahui dan memahami potensi unggulan daerah dapat diketahui sektor-sektor basis dan unggulan yang dapat dipacu/diakselerasi dan dioptimalkan guna memacu perkembangan kondisi perekonomian / perkembangan daerah pada wilayah tersebut. Hal ini tentunya akan digunakan sebagai pendorong dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Lamongan.

Nilai total PDRB ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) Kabupaten Lamongan pada tahun 2006 (yang masih merupakan angka estimasi/sangat sementara) adalah sebesar Rp. 4,082 triliun. Sedangkan berdasarkan atas dasar berlaku (ADHB), PDRB Kabupaten Lamongan mencapai Rp. 5,872 triliun atau meningkat sebesar 10,24% dibandingkantanahun 2005 dimana sebesar Rp. 2,283 triliun disumbangkan oleh sektor pertanian.

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Dari hasil perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 telah diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Lamongan tahun 2011 sebesar Rp. 10.771.552,- atau tumbuh 15,62% dari tahun 2010 dan pada tahun 2012 menjadi Rp. 12.184.430- atau tumbuh 13,11% dari tahun 2011.

Pembahasan

Di Kabupaten Lamongan, diketahui bahwa jumlah pekerja yang berpendidikan rendah lebih besar daripada pekerja yang berpendidikan tinggi. Selain itu, tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih cepat terserap oleh lapangan pekerjaan. Hal ini dikarenakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah lebih mau mengerjakan apa saja, sehingga pada kelompok ini lebih cepat memperoleh pekerjaan. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tamatan SMA, Diploma, dan Sarjana memiliki tingkat pengangguran yang lebih besar dibandingkan dengan tenaga kerja yang berpendidikan lebih rendah, yakni tamatan SD dan SMP. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin besar proporsi penganggur terdidik, dan semakin besar proporsi penganggur terdidik semakin lama mengalami masa tunggu.

Tabel 1
Data jumlah pencari kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan
Tahun 2015 - 2020

Tahun	Lulusan SD/SMP	Lulusan SMA/SMK	Lulusan Perguruan Tinggi (D1,D2,D3,S1,S2)	Jumlah total
2020	226	557	1.506	2.289
2014	223	532	1.470	2.225
2013	215	524	1.423	2.162
2012	198	510	1.390	2.098
2011	185	487	1.310	1.982
2015	170	465	1.230	1.865

Sumber : data BPS Kabupaten Lamongan

Tabel 2
Data tingkat penyerapan tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Lamongan Tahun 2015-2020

Tahun	Lulusan SD/SMP	Lulusan SMA/SMK	Lulusan Perguruan Tinggi (D1,D2,D3,S1,S2)	Penyerapan Total
2020	207	487	1.324	2.018
2014	197	458	1.310	1.965
2013	184	421	1.296	1.901
2012	164	396	1.264	1.824
2011	157	373	1.224	1.754
2015	143	352	1.136	1.631

Sumber : data BPS Kabupaten Lamongan

Dari analisis tabel di atas, terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lamongan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan berdasarkan masing-masing tingkat pendidikan dari tahun ke tahun.

Adapun untuk uraian analisis data tabel tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 1.865 orang. Kemudian pada tahun yang sama terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 143 orang atau sekitar 8,76 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 352 orang atau sekitar 21,58 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.136 orang atau sebesar 69,66 %.
2. Selanjutnya di tahun 2011 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 1.982 orang. Pada tahun yang sama terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 157 orang atau sekitar 8,95 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 373 orang atau sekitar 21,27 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.224 orang atau sebesar 69,78 %.
3. Pada tahun 2012 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 2.098 orang. Kemudian pada tahun 2012 terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 164 orang atau sekitar 8,99 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 396 orang atau sekitar 21,71 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.136 orang atau sebesar 69,30 %.
4. Kemudian pada tahun 2013 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 2.162 orang. Dan pada tahun yang sama terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 184 orang atau sekitar 9,68 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 421 orang atau sekitar 22,15 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.296 orang atau sebesar 68,17 %.
5. Di tahun 2014 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 2.225 orang. Kemudian pada tahun yang sama pula terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 197 orang atau sekitar 10,02 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 458 orang atau sekitar 23,31 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.310 orang atau sebesar 66,67 %.
6. Pada tahun 2020 jumlah pencari kerja di Kabupaten Lamongan mulai tingkat pendidikan dasar (SD/SMP), pendidikan menengah (SMA/SMK), serta perguruan tinggi (D1,D2,D3,S1,S2) tercatat sejumlah 2.289 orang. Dan pada tahun yang sama terjadi penyerapan tenaga kerja dengan pendidikan tingkat dasar sebanyak 207 orang atau sekitar 10,26 %. Sedangkan pada tingkat pendidikan menengah terserap sebanyak 487 orang atau sekitar 24,13 %. Adapun pada tingkat perguruan tinggi terjadi penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.324 orang atau sebesar 65,61 %.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan berikut :

1. Dari hasil analisis data diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja pada tingkat pendidikan dasar (SD/SMP) terjadi kenaikan yang signifikan mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2020, dengan besaran prosentase kenaikan yang berbeda di setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya industri rumah tangga maupun UMKM yang memerlukan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dasar.

2. Pada tingkat pendidikan menengah (SMA/SMK) penyerapan tenaga kerja juga mengalami peningkatan yang signifikan, akan tetapi prosentase kenaikan penyerapan juga bervariasi dari tahun ke tahun. Peningkatan ini disebabkan oleh tingkat keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan dimana pada saat ini dunia industri membutuhkan keterampilan tersebut.
3. Berbeda dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah, penyerapan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan tinggi justru mengalami penurunan dengan prosentase yang berbeda dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, meskipun jumlah tenaga kerja yang diserap mengalami kenaikan setiap tahunnya dari jumlah pencari kerja yang terdaftar. Trend penurunan ini disebabkan semakin sempitnya lahan kerja untuk pendidikan tinggi karena sudah terisi oleh tenaga kerja yang lama.

Saran

1. Pemerintah perlu memaksimalkan keberadaan sekolah-sekolah kejuruan agar terciptanya tenaga-tenaga yang siap kerja, sehingga kebutuhan pasar tenaga kerja dapat terpenuhi untuk tenaga terampil dan mandiri.
2. Perlu diadakan kegiatan pelatihan bagi setiap lulusan yang ada, yaitu bekerja sama dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
3. Pemerintah perlu mendorong pihak swasta untuk berinvestasi sehingga dapat membuka lapangan kerja, yaitu dengan memberikan kemudahan birokrasi.
4. Perlu ditingkatkan peranan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja Usaha Kecil dan menengah dengan terjun langsung untuk memantau perkembangan usaha sektor industri kecil, karena dari sektor tersebut penyerapan tenaga kerja terbuka luas.
5. Pemerintah mendorong pihak perbankan untuk lebih memprioritaskan untuk meminjamkan modal kepada para pengusaha agar para pengusaha dapat mengembangkan usahanya baik dalam bentuk kredit atau yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1982. *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Damodar Gujarati, 1997, *Ekonomitrika Dasar*, Erlangga Jakarta. Terjemahan Dr. Gunawan Sumodiningrat, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ichsan M, Kertahadi, 1997, *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Malang : Brawijaya Press.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Kristadi, J.E, 1992, *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta : IIIS.
- Mamesah, D.J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Miles, Matthew, B, dan A, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kuantitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Singarimbun M, dan Effendi, F, 1989, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pengelolaan Keuangan Daerah : Mendukung Pemberian Otonomi Daerah)*, Jakarta : Bina Rewa Parawira.
- Soetrisno, P.H, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta : FE UGM.
- Syamsi, I, 1988, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta : Bina Aksara.
- Tambunan, B.S, 1996, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta : Bina Rena Prawira.

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono, 1982. *Ekonomi Mikro*, BPFE, Yogyakarta.
- Damodar Gujarati, 1997, *Ekonomitrika Dasar*, Erlangga Jakarta. Terjemahan Dr. Gunawan Sumodiningrat, BPFE UGM, Yogyakarta.
- Ichsan M, Kertahadi, 1997, *Administrasi Keuangan Daerah : Pengelolaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*, Malang : Brawijaya Press.
- Islamy, M. Irfan, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Kaho, Josef Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Kristadi, J.E, 1992, *Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta : IIIS.
- Mamesah, D.J, 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Miles, Matthew, B, dan A, Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kuantitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Nazir, Moh, 1998, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Singarimbun M, dan Effendi, F, 1989, *Metodologi Penelitian Survei*, jakarta : LP3ES.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1997, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat (Pengelolaan Keuangan Daerah : Mendukung Pemberian Otonomi Daerah)*, Jakarta : Bina Rewa Parawira.
- Soetrisno, P.H, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Yogyakarta : FE UGM.
- Syamsi, I, 1988, *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta : Bina Aksara.
- Tambunan, B.S, 1996, *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, Jakarta : Bina Rena Prawira